el-Huda 17(1) (2026)

Jurnal el-Huda: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan

https://ejurnal.iaiqh.ac.id/index.php/el-huda

Studi Komparatif Sistem Pendidikan Indonesia dengan Mesir

Sri Winarsih Daya[1], Dian Wulandari[2], Nurul Fauziah[3], Naufal Nabil[4], Muhammad Raihan Alfaridho[5], Erna Retna Safitri[6], Hudaidah[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.59702/el-huda.v17i01.358

Jurnal Info
Dikirim: 09/12/2025
Revisi: 10/04/2026
Diterima: 14/04/2026

Korespondensi:

Phone: +62……..

Abstract: This study conducts a comparative analysis of the education systems in Indonesia and Egypt, two Muslim-majority countries facing similar educational challenges but employing different reform strategies. The objectives are to compare the structures and levels of education, identify similarities and differences in major challenges, and formulate cross-country lessons that can be adopted by both nations. Employing a qualitative comparative research design based on document analysis and systematic literature review, this study examined primary and secondary sources from 2023 to 2026, including national education laws, Egypt's Education Sector Plan, Indonesia's Merdeka Curriculum, and reports from UNESCO and the World Bank. The findings reveal that Indonesia adopts a decentralized approach through the Merdeka Curriculum, emphasizing teacher autonomy and project-based learning. In contrast, Egypt implements a centralized model via Education 2.0 and the Egyptian Baccalaureate, set for full implementation in 2026, focusing on competency development, creativity, and assessment transformation. Both countries share common challenges, such as low learning outcomes (Indonesia's PISA 2022 scores: mathematics 366, reading 359) and digital access gaps, although the underlying causes differ. Digital innovation serves as a key pillar in both reforms, evident in Indonesia's Merdeka Mengajar platform and Egypt's expansion of smart classrooms. This study concludes that both countries have significant potential for mutual learning. Indonesia can adopt Egypt's success in large-scale digital transformation, while Egypt can learn from Indonesia's bottom-up teacher empowerment strategies. Enhanced bilateral cooperation in education is recommended to strengthen reforms during the 2025–2027 period.
Keywords: education system, comparative study, merdeka curriculum, egyptian baccalaureate, education reform, indonesia, egypt

Abstrak : Penelitian ini melakukan studi komparatif terhadap sistem pendidikan Indonesia dan Mesir, dua negara Muslim mayoritas dengan tantangan pendidikan yang serupa namun strategi reformasi yang berbeda. Tujuan penelitian adalah membandingkan struktur dan jenjang pendidikan, mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan tantangan utama, dan merumuskan pelajaran lintas negara yang dapat diadopsi kedua negara. Penelitian ini menggunakan desain studi komparatif kualitatif berbasis analisis dokumen dan tinjauan literatur sistematis terhadap sumber primer dan sekunder periode 2023–2026, termasuk undang-undang pendidikan, rencana strategis sektor pendidikan Mesir, Kurikulum Merdeka Indonesia, dan laporan UNESCO serta World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan desentralisasi dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan otonomi guru dan pembelajaran berbasis proyek, sementara Mesir menggunakan model sentralisasi melalui Education 2.0 dan Egyptian Baccalaureate yang akan diterapkan penuh mulai tahun 2026 dengan fokus pada kompetensi, kreativitas, dan transformasi penilaian. Kedua negara menghadapi tantangan bersama seperti rendahnya kualitas hasil belajar (PISA Indonesia 2022: matematika 366, membaca 359) dan kesenjangan akses digital, meskipun penyebabnya berbeda. Reformasi digital menjadi pilar utama di kedua negara, dengan platform Merdeka Mengajar di Indonesia dan perluasan smart classroom di Mesir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua negara memiliki peluang besar untuk saling belajar. Indonesia dapat mengadopsi keberhasilan Mesir dalam transformasi digital secara masif, sementara Mesir dapat memetik pengalaman Indonesia dalam pemberdayaan guru secara bottom-up. Kerja sama bilateral di bidang pendidikan direkomendasikan untuk memperkuat reformasi periode 2025–2027.
Kata kunci: sistem pendidikan, studi komparatif, kurikulum merdeka, egyptian baccalaureate, reformasi pendidikan, indonesia, mesir

Email: 06032682529031@student.unsri.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan berfungsi sebagai fondasi penting bagi pembangunan di negara-negara mayoritas Muslim, menjalin nilai-nilai agama dengan pembelajaran formal untuk mendorong pertumbuhan moral dan intelektual. Pendidikan Diniyah, yang mengintegrasikan ajaran agama ke dalam sistem pendidikan nasional, meningkatkan pemahaman tentang moralitas dan identitas agama, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan nilai-nilai masyarakat (Rifdillah et al., 2024). Indonesia dan Mesir sebagai dua negara Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan sekaligus peluang yang serupa dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional mereka. Dengan populasi yang besar dan dinamika sosial budaya yang dipengaruhi nilai-nilai Islam, kedua negara ini telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan visi nasional masing-masing. Studi komparatif antar negara seperti ini menjadi semakin relevan karena dapat mengungkapkan praktik baik yang dapat saling diadopsi guna mempercepat pencapaian target pembangunan manusia.

Dari segi akses Pendidikan, kedua negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2025, tingkat melek huruf Indonesia untuk individu berusia 15 tahun ke atas diproyeksikan mencapai 97,10%, menandai tonggak penting dalam lanskap pendidikan negara, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik. Peningkatan ini dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi melalui program berbasis masyarakat dan peningkatan infrastruktur pendidikan (Faizah et al., 2025) Pada 2024, tingkat penyelesaian pendidikan dasar Mesir dilaporkan sebesar 96%, mendekati tujuan pendidikan universal. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam kehadiran sekolah dan pencapaian pendidikan, meskipun masih ada tantangan terkait kualitas pendidikan dan kesenjangan sosial ekonomi yang mempengaruhi akses dan hasilnya (Elbadawy, 2014). Meskipun demikian, kualitas hasil belajar masih menjadi persoalan bersama. Hasil PISA 2022 mengungkapkan tantangan pendidikan yang signifikan bagi Indonesia dan Mesir, dengan kedua negara menunjukkan kinerja siswa yang rendah dalam membaca, matematika, dan sains. Indonesia mendapat nilai 359 dalam membaca, 366 dalam matematika, dan 383 dalam sains, masing-masing peringkat 59, 67, dan 65 di antara 81 negara, menunjukkan penurunan kinerja akademik sejak partisipasi pertamanya pada tahun 2001(Bilad et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan telah meluas, capaian belajar yang bermakna masih menjadi tantangan krusial bagi kedua negara.

Hubungan historis dan budaya yang kuat antara Indonesia dan Mesir semakin memperkaya nilai studi komparatif ini. Universitas Al-Azhar di Kairo secara historis berfungsi sebagai pusat penting untuk pendidikan Islam, yang secara signifikan mempengaruhi para sarjana Muslim di Indonesia. Banyak mahasiswa Indonesia, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Mahmud Yunus, telah belajar di Al-Azhar, di mana mereka menyerap ide-ide reformis, terutama dari Muhammad Abduh, yang menekankan interpretasi rasional Al-Qur'an dan kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern(Anwar et al., 2020). Ribuan mahasiswa Indonesia setiap tahunnya menempuh studi di Al-Azhar, dan para alumninya memainkan peran penting dalam pengemabangan pendidikan Islam moderat serta kebijakan pendidikan nasional di tanah air. Pengaruh ini terlihat jelas dalam integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum pendidikan Indonesia, baik di madrasah maupun pesantren, yang mirip dengan peran Al-Azhar dalam sistem pendidikan Mesir. Dengan demikian, perbandingan sistem pendidikan kedua negara tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga membawa dimensi historis dan keagamaan yang mendalam.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara melakukan reformasi pendidikan yang ambisius dan berorientasi pada masa depan. Di Indonesia, Program Merdeka Belajar, yang dimulai pada tahun 2019 dan ditetapkan menjadi Kurikulum Mandiri nasional pada tahun ajaran 2024/2025, menekankan pendekatan berbasis kompetensi, otonomi guru, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam praktik pendidikan, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman belajar untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa, sehingga menumbuhkan keterampilan kritis abad ke-21 seperti kreativitas dan kolaborasi(Hutabarat et al., 2025). Reformasi ini bertujuan mengurangi beban kurikulum dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan abad ke -21. Di sisi lain, Mesir tahun 2025 berhasil meningkatkan tingkat kehadiran siswa hingga 87,5 persen dan meluncurkan sistem Egyptian Baccalaureate yang akan diterapkan penuh mulai tahun 2026 (Korra, 2000). Reformasi ini menggeser pendekatan hafalan menjadi pembelajaran berbasis kompetensi, kreatifitas, serta pemanfaatan teknologi digital melalui perluasan kelas pintar dan peningkatan keterampilan guru. Visi 2030 pemerintah menekankan perlunya kebijakan yang koheren yang meningkatkan kualitas pendidikan dan inklusivitas, yang mencerminkan komitmen terhadap “pendidikan untuk semua"(Lingtao & Qi, n.d.). Kedua reformasi tersebut mencerminkan kesadaran bersama akan perlunya transformasi sistem pendidikan agar lebih adaptif terhadap tuntutan global.

Meskin demikian, berbagai tantangan struktural masih membayangi upaya reformasi di kedua negara. Overcrowding kelas, kesenjangan akses antar wilayah urban dan rural, serta keterbatasan kualitas guru menjadi masalah bersama yang perlu diatasi secara sistematis. Selain itu, pandemic Covid-19 memperburuk learning loss da memperlebar kesenjangan digital, sehingga memperkuat urgensi untuk melakukan pembelajaran lintas negara. Studi komparatif yang mendalam dan terkini menjadi sangat diperlukan karena sebagian besar penelitian sebelumnya belum membahas reformasi terbaru yang dilakukan kedua negara pada periode 2023 hingga 2025.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai struktur, kebijakan, tantangan, serta peluang pembelajaran antara sistem pendidikan Indonesia dan Mesir. Melalui pendekatan ini,

diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konkrit bagi pemerintah Indonesia maupun Mesir dalam memperkuat sistem pendidikan nasional masing-masing serta mempereta kerja sama bilateral di bidang pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut: pertama, mengetahui perbandingan struktur, jenjang pendidikan, dan kebijakan utama antara sistem pendidikan Indonesia dan Mesir; kedua, kesamaan dan perbedaan tantangan utama yang dihadapi kedua sistem pendidikan tersebut, dan; ketiga, pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari sistem pendidikan Mesir dan sebaliknya untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain studi komparatif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan tinjauan literatur sistematis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan Mesir secara mendalam, objektif, dan kontekstual tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan. Desain studi komparatif kualitatif sangat sesuai untuk menganalisis dokumen resmi, kebijakan pendidikan, dan laporan internasional yang bersifat publik, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur, kebijakan, tantangan, serta peluang pembelajaran lintas negara. Penelitian ini mengadopsi kerangka metode komparatif pendidikan yang dikembangkan oleh Bereday (1964) dan Bray et al. (2014), yang mencakup tahapan deskripsi, interpretasi, juxtaposisi, serta perbandingan tematik. Selain itu, analisis dokumen dilakukan secara sistematis sesuai prinsip yang dikemukakan oleh Bowen (2009), yaitu melalui proses identifikasi, evaluasi, dan interpretasi dokumen sebagai sumber data kualitatif utama. Dengan demikian, desain penelitian ini mendukung pencapaian ketiga rumusan masalah secara tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen primer dan sekunder yang bersifat publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen primer mencakup peraturan perundang-undangan resmi Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk regulasi terkait Kurikulum Merdeka. Untuk Mesir, dokumen primer meliputi Education Sector Plan for Egypt 2023–2027 yang diterbitkan oleh Ministry of Education and Technical Education (MoETE) serta dokumen reformasi Egyptian Baccalaureate yang mulai diterapkan secara bertahap pada tahun ajaran 2025/2026. Dokumen sekunder terdiri atas laporan resmi internasional dan nasional, antara lain laporan Global Education Monitoring Report UNESCO tahun 2024 dan 2026, laporan World Bank tentang reformasi pendidikan Mesir, data statistik pendidikan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia periode 2023–2025, serta Annual Bulletin of Pre-University Education dan statistik pendidikan dari Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir tahun 2023/2024 hingga 2025. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah bereputasi dan laporan reformasi pendidikan terkini yang diterbitkan antara tahun 2023 hingga 2026. Pemilihan sumber data dilakukan secara sistematis dengan kriteria inklusi berupa dokumen resmi, data statistik terbaru, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema studi komparatif sistem pendidikan kedua negara.

Tabel 1. Seleksi Dokumen (Kriteria Inklusi & Eksklusi)

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Relevansi Tematik	Kebijakan nasional, data statistik, reformasi kurikulum, dan kerangka hukum pendidikan.	Dokumen di luar sektor pendidikan atau dokumen yang tidak memiliki kaitan sistemik.
Rentang Waktu	Dokumen kontemporer (2023-2026) untuk data lapangan; UU 20/2003 sebagai landasan hukum tetap.	Laporan yang sudah kedaluwarsa atau tidak lagi mencerminkan kebijakan aktif.
Otoritas Sumber	Publikasi pemerintah (Kemendikbudristek, CAPMAS) dan organisasi internasional (UNESCO, World Bank, GPE).	Sumber opini tanpa data empiris atau sumber berita non-akademik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui pendekatan tinjauan dokumen dan pencarian literatur terstruktur. Proses dimulai dengan identifikasi dokumen primer dan sekunder yang relevan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu dokumen resmi pemerintah, laporan internasional, data statistik terbaru (periode 2023–2026), serta publikasi ilmiah yang membahas sistem pendidikan Indonesia dan Mesir. Pencarian dokumen dilakukan melalui situs resmi pemerintah, repositori internasional, dan database akademik seperti Google Scholar, UNESCO Digital Library, World Bank Open Knowledge

Repository, serta portal resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir.

Dokumen primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta peraturan turunannya dan Education Sector Plan for Egypt 2023–2027 dikumpulkan langsung dari situs peraturan.bpk.go.id dan Global Partnership for Education. Sementara itu, dokumen terkait Egyptian Baccalaureate 2025/2026 diperoleh dari laporan resmi Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Teknis Mesir serta berita resmi pemerintah. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap utama: tahap pertama melibatkan pengumpulan dan penyimpanan dokumen secara digital, sedangkan tahap kedua mencakup skrining awal untuk memastikan relevansi dan kebaruan data. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan prinsip transparansi dan akurasi, sehingga data yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis komparatif yang kredibel.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten tematik komparatif yang mengintegrasikan kerangka metode komparatif pendidikan Bereday (1964) dan pendekatan thematic analysis sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis diawali dengan tahap familiarization, yaitu pembacaan berulang terhadap seluruh dokumen yang telah diseleksi. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui empat tahap utama sesuai model Bereday: (1) deskripsi, yaitu penyajian fakta secara objektif mengenai struktur, jenjang pendidikan, kebijakan, dan reformasi di Indonesia dan Mesir; (2) interpretasi, yaitu penjelasan latar belakang sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi sistem pendidikan masing-masing negara; (3) juxtaposition, yaitu penjajaran data secara berdampingan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan; serta (4) perbandingan (comparison), yaitu penarikan kesimpulan berupa pelajaran (lessons learned) dan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi. Teknik coding dilakukan secara manual dengan bantuan tabel matriks perbandingan untuk mengelompokkan tema-tema utama, yaitu struktur dan jenjang pendidikan, kebijakan utama, tantangan utama, serta reformasi terkini. Analisis dilakukan secara induktif dan deduktif secara bersamaan sehingga menghasilkan temuan yang mendalam, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan ini sangat sesuai untuk studi komparatif berbasis dokumen karena mampu menjawab ketiga rumusan masalah secara komprehensif dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Dari perbandingan struktur, jenjang dan kebijakan utama sistem pendidikan Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh paradigma otonomi dan fleksibilitas melalui Kurikulum Merdeka. Berdasarkan UU No. 20/2003, sistem ini bersifat inklusif terhadap berbagai bentuk jalur pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan yang terintegrasi. Kebijakan utamanya saat ini berfokus pada debirokratisasi pengajaran, di mana penilaian sekolah dialihkan dari ujian individual yang berisiko tinggi (*high-stakes testing*) menuju Asesmen Nasional yang lebih bertujuan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan belajar dan literasi-numerasi secara kolektif. Di sisi lain, Sistem Pendidikan Mesir menunjukkan upaya modernisasi yang sangat ambisius melalui program Education 2.0. Berdasarkan laporan GPE (2023) dan World Bank (2025), Mesir berupaya keras merombak budaya belajar dari "menghafal untuk ujian" menjadi pemahaman konseptual. Struktur pendidikan Mesir memiliki keunikan berupa dualisme sistem antara sekolah umum negeri dan sistem Al-Azhar yang sangat berpengaruh. Kebijakan utamanya saat ini sangat menekankan pada infrastruktur teknologi, seperti pembagian tablet bagi siswa menengah dan pengembangan bank soal digital berskala nasional untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Secara struktural, kedua negara memiliki kemiripan dalam pembagian jenjang pendidikan (6-3-3). Namun, secara kebijakan, Indonesia lebih menekankan pada pemberdayaan guru dan konteks lokal, sedangkan Mesir lebih menekankan pada standarisasi teknologi dan reformasi sistem evaluasi untuk memicu perubahan perilaku belajar siswa.

Tabel 2. Hasil Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Mesir

Dimensi Perbandingan	Sistem Pendidikan Indonesia	Sistem Pendidikan Mesir
Dasar Hukum Utama	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.	*Education Sector Plan* (ESP) 2023–2027 & Konstitusi Mesir.
Struktur Jenjang	6-3-3 (SD, SMP, SMA/SMK).	6-3-3 (Primary, Preparatory, Secondary).
Pendidikan Dasar	Wajib Belajar 9 tahun (sedang transisi ke 12 tahun).	Wajib Belajar 9 tahun (Primary & Preparatory).

Dimensi Perbandingan	Sistem Pendidikan Indonesia	Sistem Pendidikan Mesir
Jalur Pendidikan	Formal, Non-formal, Informal; Umum dan Keagamaan (Madrasah).	Umum (Kementerian Pendidikan) dan Al-Azhar (Sistem pendidikan Islam).
Kebijakan Kurikulum	Kurikulum Merdeka: Fokus pada materi esensial dan fleksibilitas guru.	Education 2.0 (EDU 2.0): Transformasi kurikulum berbasis kompetensi dari PAUD ke atas.
Sistem Penilaian	Asesmen Nasional (AN) untuk pemetaan mutu; tidak menentukan kelulusan siswa.	Reformasi *Thanaweya Amma* (Ujian Menengah Atas) berbasis komputer/tablet.
Arah Kebijakan Utama	Digitalisasi melalui platform Merdeka Mengajar & Pemulihan Pembelajaran.	Peningkatan akses di daerah tertinggal & keselarasan lulusan dengan pasar kerja.

Indonesia dan Mesir sama-sama terjebak dalam fenomena "krisis pembelajaran" (*learning crisis*). Meskipun angka partisipasi sekolah (APK) di kedua negara telah meningkat pesat, data UNESCO (2026) menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar belum berbanding lurus dengan lamanya waktu sekolah. Keduanya sedang berjuang melakukan transisi dari kurikulum tradisional ke model berbasis kompetensi, namun terhambat oleh resistensi perubahan di tingkat akar rumput (guru dan orang tua) serta keterbatasan infrastruktur digital yang belum sepenuhnya inklusif.

Tabel 3. Kesamaan dan Perbedaan Sistem Pendidikan Indonesia dan Mesir

Dimensi Tantangan	Kesamaan (Similarities)	Perbedaan (Differences)
Kualitas Pembelajaran	Krisis literasi dan numerasi; banyak siswa di sekolah namun tidak mencapai standar kompetensi minimum.	Indonesia: Kesenjangan kualitas yang lebar antara wilayah urban dan daerah 3T. Mesir: Masalah kepadatan kelas yang ekstrem di wilayah urban.
Kesejahteraan & Mutu Guru	Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru agar selaras dengan kurikulum baru.	Indonesia: Tantangan administratif terkait distribusi guru dan status guru honorer. Mesir: Masalah ketergantungan guru pada les privat (*private tutoring*) yang melemahkan sistem sekolah formal.
Relevansi Lulusan	Adanya *mismatch* (ketidaksesuaian) antara keterampilan lulusan sekolah menengah dengan kebutuhan pasar kerja global.	Indonesia: Fokus pada revitalisasi SMK agar lebih adaptif terhadap industri digital. Mesir: Fokus pada perbaikan gengsi pendidikan vokasi yang sering dianggap kelas dua.
Infrastruktur	Digitalisasi belum merata; keterbatasan akses internet stabil di wilayah-wilayah tertentu.	Indonesia: Tantangan geografis (kepulauan) yang menyulitkan logistik pendidikan. Mesir: Keterbatasan lahan di sekitar Nil untuk membangun sekolah baru guna mengimbangi laju populasi.

Perbedaan Tantangan Utama Tantangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Sebagai negara kepulauan, hambatan utama adalah disparitas kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, di mana pemerataan akses guru berkualitas dan fasilitas fisik menjadi isu kronis. Sebaliknya, tantangan di Mesir lebih bersifat demografis-struktural. Pertumbuhan populasi yang terkonsentrasi di sepanjang Sungai Nil menyebabkan sekolah-sekolah negeri mengalami kelebihan kapasitas yang luar biasa (*overcrowding*). Selain itu, Mesir menghadapi tantangan budaya unik berupa "sistem pendidikan paralel"

dalam bentuk industri les privat yang masif, yang sering kali lebih diutamakan oleh siswa dibandingkan pembelajaran di dalam kelas, sehingga upaya reformasi Kurikulum EDU 2.0 sering kali terbentur oleh kebiasaan lama yang berorientasi pada nilai ujian semata.

Reformasi pendidikan terkini di Indonesia dan Mesir menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pendekatan hafalan menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi. Di Indonesia, Kurikulum Merdeka telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dan mulai diterapkan secara penuh pada tahun ajaran 2024/2025, dengan target perluasan menyeluruh ke seluruh jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026. Sementara itu, Mesir melalui program Education 2.0 dan Egyptian Baccalaureate melakukan transformasi serupa dengan peluncuran penuh sistem ujian sekolah menengah baru pada tahun 2026 yang menekankan pemahaman, kreativitas, pemecahan masalah, dan penggunaan alat digital sehari-hari.

Inovasi digital menjadi pilar utama dalam kedua reformasi tersebut. Di Indonesia, platform Merdeka Mengajar (PMM) berfungsi sebagai sarana pelatihan guru, berbagi praktik baik, dan penyediaan sumber belajar digital, didukung oleh aplikasi Rapor Pendidikan, ARKAS, dan SIPLah. Di Mesir, inovasi digital mencakup perluasan smart classroom, konektivitas internet di lebih dari 54.000 sekolah, serta distribusi sumber belajar melalui Egyptian Knowledge Bank dan saluran televisi edukasi Madrastena. Target kedua negara pada periode 2025–2027 difokuskan pada peningkatan akses digital, penguatan kompetensi abad ke-21, dan peningkatan hasil belajar siswa.

Tabel 4. Perbandingan Reformasi, Inovasi Digital, dan Target Utama Indonesia dan Mesir

Aspek	Indonesia (Kurikulum Merdeka)	Mesir (Education 2.0 & Egyptian Baccalaureate)	Sumber Data
Tahun Peluncuran & Implementasi	Ditetapkan nasional 2024; full implementation 2025/2026	Education 2.0 sejak 2018; Egyptian Baccalaureate full 2026	Permendikbudristek No. 12/2024; MoETE 2025
Pendekatan Pembelajaran	Berbasis kompetensi, proyek (P5), diferensiasi, otonomi guru	Berbasis kompetensi, kreativitas, pemecahan masalah	Kemendikbudristek 2024; WEF 2026
Inovasi Digital	Platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, ARKAS, SIPLah	Smart classroom (36.878 sekolah), Egyptian Knowledge Bank, TV edukasi Madrastena, student digital ID	Oliver Wyman 2025; UNESCO 2025; World Bank 2026
Pelatihan Guru Digital	Pelatihan melalui PMM dan program sertifikasi digital	386.000+ guru tersertifikasi digital; hampir 1 juta dalam pelatihan	UNESCO IICBA 2025
Target Utama 2025–2027	Implementasi penuh di semua sekolah; integrasi AI & literasi digital; peningkatan literasi & numerasi	Peluncuran penuh Egyptian Baccalaureate 2026; transformasi digital 100% sekolah menengah; peningkatan akses dan hasil belajar	Kemendikbudristek 2025; MoETE & World Bank 2025–2026

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dalam struktur dan jenjang pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan pendekatan desentralisasi, sedangkan Mesir menggunakan sistem sentralisasi yang lebih ketat dengan jenjang pendidikan dasar yang lebih panjang (8 tahun). Perbedaan ini mencerminkan pilihan kebijakan nasional masing-masing negara: Indonesia menekankan otonomi daerah sesuai semangat desentralisasi pasca-reformasi 1998, sementara Mesir mempertahankan kontrol pusat untuk menjamin keseragaman mutu di tengah tantangan geografis dan demografis yang luas. Temuan ini sejalan dengan Bray et al. (2014) yang menyatakan bahwa model tata kelola pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejarah politik dan budaya negara tersebut.

Kedua negara menghadapi tantangan bersama yang hampir identik, yaitu rendahnya kualitas hasil belajar, kesenjangan akses urban-rural, serta keterbatasan kompetensi guru digital (lihat Tabel 2). Namun, intensitas dan penyebab tantangan tersebut berbeda. Di Indonesia, kesenjangan digital lebih disebabkan oleh disparitas infrastruktur antarwilayah, sedangkan di Mesir tantangan utama adalah overcrowding kelas akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Temuan ini memperkuat laporan UNESCO (2026) yang menyatakan bahwa negara-negara Muslim mayoritas dengan populasi besar cenderung mengalami pola tantangan pendidikan yang serupa meskipun dengan konteks implementasi yang berbeda.

Reformasi terkini kedua negara menunjukkan arah yang searah namun dengan strategi yang berbeda. Kurikulum Merdeka di Indonesia menekankan otonomi guru dan pembelajaran berbasis proyek, sementara Egyptian Baccalaureate dan Education 2.0 di Mesir lebih fokus pada transformasi penilaian nasional dan perluasan smart classroom. Pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari Mesir adalah keberhasilan pendekatan sentralisasi dalam mempercepat transformasi digital di skala nasional, terutama perluasan smart classroom yang telah mencapai lebih dari 36 ribu sekolah dalam waktu singkat. Sebaliknya, Mesir dapat memetik pengalaman Indonesia dalam memberdayakan guru melalui platform Merdeka Mengajar yang bersifat bottom-up. Kedua negara memiliki peluang besar untuk saling melengkapi, terutama dalam pengembangan kompetensi abad ke-21 dan integrasi teknologi pendidikan pada periode 2025–2027.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan dalam struktur, kebijakan, tantangan, serta upaya reformasi. Dari segi struktur dan jenjang pendidikan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dengan wajib belajar 12 tahun, sementara Mesir menggunakan pendekatan sentralisasi dengan jenjang pendidikan dasar yang lebih panjang. Kedua negara menghadapi tantangan yang hampir serupa, yaitu rendahnya kualitas hasil belajar, kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, serta keterbatasan kompetensi guru di era digital. Namun, penyebab dan intensitas tantangan tersebut berbeda sesuai dengan konteks sosial, demografis, dan politik masing-masing negara.

Reformasi pendidikan terkini di kedua negara menunjukkan arah yang searah, yaitu pergeseran dari pendekatan hafalan menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital. Kurikulum Merdeka di Indonesia menekankan otonomi guru dan pembelajaran berbasis proyek, sedangkan Egyptian Baccalaureate dan Education 2.0 di Mesir lebih fokus pada transformasi sistem penilaian nasional serta perluasan smart classroom. Secara keseluruhan, kedua negara memiliki potensi besar untuk saling belajar dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran berikut dapat diajukan: Pertama, bagi pemerintah Indonesia, disarankan untuk mempelajari dan mengadopsi keberhasilan Mesir dalam mempercepat transformasi digital melalui pendekatan sentralisasi, khususnya perluasan smart classroom dan integrasi teknologi pendidikan di skala nasional. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penguatan sistem penilaian berbasis kompetensi seperti Egyptian Baccalaureate untuk melengkapi Kurikulum Merdeka; Kedua, bagi pemerintah Mesir, pengalaman Indonesia dalam memberdayakan guru melalui platform digital seperti Merdeka Mengajar dapat menjadi referensi penting untuk meningkatkan partisipasi guru secara bottom-up dalam proses reformasi pendidikan; Ketiga, kedua negara disarankan untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan, antara lain melalui pertukaran pengalaman guru, pengembangan kurikulum bersama yang berbasis nilai Islam moderat, serta program joint research tentang pemanfaatan teknologi pendidikan. Kerja sama ini dapat difokuskan pada periode 2025–2027 untuk mendukung pencapaian target reformasi masing-masing negara.

Akhirnya, penelitian lanjutan disarankan dilakukan dengan pendekatan mixed-methods atau studi kasus lapangan di kedua negara untuk memperoleh data primer dari perspektif guru, siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan. Penelitian mendatang juga dapat membandingkan aspek pendidikan Islam secara lebih mendalam antara pesantren di Indonesia dan sistem Al-Azhar di Mesir.

Referensi

Alam, F. K., & Cahyono, A. E. (2022). Perbandingan Modernisasi Pendidikan Islam Mesir dan Indonesia. Jurnal Tarbiyah Islamiyah.

Anwar, R., Muhyi, A. A., & Riyani, I. (2020). *Pengaruh ide pembaharuan abduh di mesir pada tradisi tafsir di indonesia: kajian terhadap tafsir qur'an karim karya mahmud yunus*. *18*(2), 221–242. https://doi.org/10.18592/KHAZANAH.V18I2.3825

Assaad, R., & Krafft, C. (2015). Is free basic education in Egypt a reality or a myth? International Journal of Educational Development, 45, 16-30.

Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. Holt, Rinehart and Winston. (Tersedia melalui Google Books dan perpustakaan universitas; banyak dikutip di jurnal pendidikan).

Bishop, A., FitzSimons, G., Seah, W.T., & Clarkson, P. (2018). *Values in mathematics education: Making values teaching explicit in the mathematics classroom*. Paper presented at the AARE Annual Conference, Melbourne.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027 (PDF lengkap gratis tersedia di ResearchGate dan Emerald Insight).

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (Eds.). (2014). *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05644-9

Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS). (2025). *Annual bulletin of pre-university education 2023/2024*. CAPMAS. https://censusinfo.capmas.gov.eg

Faizah, A. N., Nurkomariyah, R., Denova, Moh. A. D., & Mas'odi, M. (2025). Peran Literasi Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(3), 286–292. https://doi.org/10.31004/abdira.v5i3.759

Bilad, M. R., Zubaidah, S., & Prayogi, S. (2024). Addressing the PISA 2022 Results: A Call for Reinvigorating Indonesia's Education System. *International Journal of Essential Competencies In Education*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.36312/ijece.v3i1.1935

Global Partnership for Education. (2023). *Education sector plan for Egypt 2023–2027*. https://www.globalpartnership.org/content/education-sector-plan-2023-2027-egypt

Hutabarat, K. H., Luhukay, M. Z., Putri. A, Z. R., Iskandar, S., Hutabarat, K. H., Luhukay, M. Z., Putri. A, Z. R., & Iskandar, S. (2025). Analisis konsep kurikulum merdeka dalam pendidikan di indonesia. *Pedagogik. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, *13*(2), 304–310. https://doi.org/10.33558/pedagogik.v13i2.11071

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional*. Kemendikbudristek. https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf

Khaldoun, J. (2022). Public Education in Egypt: Policy Paper. BUC Centre for Global Affairs.

KONG, L., & SHEN, Q. (n.d.). *An Analysis of the Education Development Strategy in Egypt's "vision 2030."* https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-5485.2018.10.021

Korra, S. (2000). *Un défi national. La réforme de l'éducation en Égypte*. *27*, 71–76. https://doi.org/10.4000/RIES.2380

Nasution, J. E. (2022). Analisis Kebijakan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan di Mesir. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 17(2).

Oliver Wyman. (2025). Analyzing Indonesia's technology-driven education reform. https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2023/dec/technology-driven-education-reform-indonesia.html

Qolbiyah, A., Rajab, H., & Faisal, M. (2022). Sistem Pendidikan di Mesir. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 1(2), 318-325.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rifdillah, M., Vitisia, V., Gunawan, W., Hidayat, W., & Gunawan, A. (2024). Implikasi kebijakan pendidikan diniyah terhadap peningkatan pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. *Social*, *3*(4), 181–190. https://doi.org/10.51878/social.v3i4.3069

Elbadawy, A. (2014). Education in Egypt: Improvements in Attainment, Problems with Quality and Inequality. *Research Papers in Economics*. https://ideas.repec.org/p/erg/wpaper/854.html

Stopikowska, M., & El-Deabes, Y. M. (2012). The education system of Egypt: Contexts, frames and structures. Problems of Education in the 21st Century, 40, 129-144.

Sulaiman, S., Rusdinal, R., Gistituati, N., & Ananda, A. (2021). Sistem pendidikan Mesir dan perbandingannya dengan Indonesia. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 10(3), 395-413.

Tusyadiah, H., Mislaini, & Jannah, R. (2024). Perbandingan sistem pendidikan agama di Indonesia dan Mesir yang menjadi daya tarik mahasiswa Indonesia untuk menuntut ilmu di Mesir. Jurnal Media Akademik, 2(12).

UNESCO. (2026). *Global education monitoring report 2026: Access and equity – Countdown to 2030*. UNESCO Publishing. https://www.unesco.org/gem-report/en

UNICEF Egypt. (2024). The Impact of Population Trends on the Needs of the Education System: Data Snapshot Issue 10. UNICEF.

World Bank. (2025). *Egypt education reform project reports*. World Bank Group.

World Bank. (2025). *Supporting Egypt education reform project: Implementation status & results report*. World Bank Group.

World Economic Forum. (2026, February 4). *How Egypt is reimagining education for the future of work*. https://www.weforum.org/stories/2026/02/egypt-reimagining-education-future-of-work/